

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Adrie, *Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas , *Hukum Acara Pidana (Edisi Ketiga)*, Kencana, Makassar, 2016.

A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kopendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan*, Jakarta, 2012.

Chaeruddin,SH.,MH, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2008.

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Fajlurrahman Jurdi, *Kejahatan Korupsi*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2016.

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Panduan Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*, 2019.

Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Mataram, 2017.

H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta.

- Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Media Group, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Makassar, 2016.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- SF. Marbun, Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum*, Pustaka Refleksi, 2010.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008.

JURNAL

Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 1, Desember, 2014.

Ni Wayan Sinaryati, *Fungsi Jaksa Dalam Menuntut Terdakwa Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Negara Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4, 2015.

Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015.

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

WEB

M. Agus Yozami,

<https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9b5918e2ce3/se-mendagri-yang-meminta-agar-pns-tipikor-diberhentikan-secara-tidak-hormat?page=all>, diakses pada 21 November 2020, Pukul 20:12 WITA.